

PARAFASE 5.docx

By Turnitin LLC

3
**ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN
TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA SENCALANG
PERIODE 2023-2025**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Islam Indragiri*



OLEH :

ELDA SEPITRI
NIM : 101221010018

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026**

LEMBAR KEABSAHAN SKRIPSI
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ELDA SEPITRI

NIM : 101221010018

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Rasio Efektivitas Dan Rasio ³ Pertumbuhan
Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sencalang
Periode 2023 – 2025.

² Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Tembilahan, 01 Mei 2026
Penulis

ELDA SEPITRI

ABSTRACT

ANALYSIS OF EFFECTIVENESS RATIO AND GROWTH RATIO ON THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATION IN SENCALANG VILLAGE FOR THE PERIOD 2023 – 2025

Elda Sepitri, Management, Economics and Business, Indragiri Islamic University
Email: eldasepitri05@gmail.com

This study aims to evaluate the financial performance of the Sencalang Village government—located in Keritan District, Indragiri Hilir Regency—specifically regarding the management of the Village Fund Allocation (ADD) for the 2023–2025 period. A quantitative descriptive method was employed, utilizing secondary data obtained from the Sencalang Village Budget (APBDes) implementation reports. The study's population and sample were derived from APBDes financial reports covering the 2023–2025 period. The research variables included the Effectiveness Ratio and Growth Ratio as independent variables, and Village Fund Allocation management as the dependent variable. Data collection was conducted through documentation and observation. The results indicate that the Effectiveness Ratio for ADD management in Sencalang Village consistently reached 100% during the 2023–2025 period, categorizing it as "effective." However, the ADD Revenue Growth Ratio showed low and fluctuating results: 12.8% in 2023, dropping to 9.40% in 2024, and rising again to 20.49% in 2025. This low revenue growth is attributed to the fact that the ADD relies heavily on central government policies and the regency's General Allocation Fund (DAU) formula. Similarly, the Expenditure Growth Ratio experienced significant fluctuations: 9.81% in 2023, 14.14% in 2024, and a sharp decline to -26.04% in 2025. Based on these findings, it is recommended that the village government maintain its effectiveness level, conduct periodic evaluations, and optimize the role of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) "Al-Hidayah" to ensure more stable growth in village-generated revenue and a broader positive impact on community welfare.

Keywords: *Effectiveness Ratio, Growth Ratio, Village Fund Allocation, Financial Performance*

ABSTRAK

ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA SENCALANG PERIODE 2023 – 2025

²
Elda Sepitri, Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Indragiri
Email: eldasepitri05@gmail.com

³
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah Desa Sencalang yang terletak di Kecamatan keritang, Kabupaten Indragiri Hiir, terutama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk periode 2023 – 2025. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Sencalang. Populasi dan sampel dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan APBDes selama periode 2023 – 2025. Variabel penelitian yang digunakan Rasio efektivitas dan Rasio Pertumbuhan sebagai variabel independen, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai variabel dependen. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas pengelolaan ADD di Desa Sencalang selama periode 2023 – 2025 secara konsisten mencapai 100% dan dikategorikan “efektif”. Akan tetapi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD menunjukkan hasil yang rendah dan berflukatif yaitu 12,8% pada tahun 2023, turun menjadi 9,40% pada tahun 2024, dan meningkat kembali 20,49 pada tahun 2025. Rendahnya Pertumbuhan Pendapatan disebabkan karena ADD sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan formula DAU kabupaten. Demikian pula Rasio Pertumbuhan Belanja mengalami fluktuasi signifikan yaitu 9,81% pada tahun 2023, 14,14% pada tahun 2024, dan menurun drastis menjadi -26,04% pada tahun 2025. Berdasarkan temuan tersebut disarankan pemerintah desa untuk mempertahankan tingkat efektivitas, melakukan evaluasi secara berkala, serta mengoptimalkan peran BUMDes ALHidayah agar pertumbuhan pendapatan asli desa lebih stabil dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

³
Kata Kunci: Rasio efektivitas, Rasio Pertumbuhan, Alokasi Dana Desa, Kinerja Keuangan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karna telah diberi kesehatan, kekuatan serta keselamatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam atas Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Allahuma Sholi'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat walaupun kecil kepada para pembacanya. Adapun judul dari skripsi yang disajikan penulis adalah: **“Analisis Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sencalang Periode 2023-2025”**.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan semangat, nasehat, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Secara khusus, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Indragiri.
2. Bapak Dr. Ahmad Rif'ai, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri.
3. Ibu Syafrinadina, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Islam Indragiri.
4. Bapak Muhammad Fauzan SE.,MM. Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu, memberikan saran – saran serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Helly Khairuddin, SE.,M.Si. Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu, memberikan saran – saran serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 2
6. Seluruh dosen dan Staff Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
- 3
7. Kepala Desa Sencalang beserta seluruh staff Kantor Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian ini.
8. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Ibrahim. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Pintu surgaku, Bunda Sumarlin. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, tapi semangat motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Teruntuk Abang saya, Aldi Frendi Sendi Saputra yang telah rela berkorban dan mendahulukan pendidikan adiknya, terima kasih segala pengorbanan, dukungan dan kasih sayang tidak ternilai harganya.
- 1
11. Terimakasih untuk Juan Diva seseorang yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih juga untuk sahabat seperjuanganku, Khairunnisa, Dila Juliana, Riska Angriani, Nurfadila, Frischya Putri serta teman – teman kuliah

Manajemen A angkatan 2022 yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terakhir, untuk diri saya sendiri, *Elda Sepitri* terimakasih karena telah mampu bertahan dan berjuang hingga sampai di titik ini. Terimakasih sudah berusaha menyelesaikan skripsi ini meski harus melewati berbagai proses, tekanan, rasa lelah, dan keraguan.

² **Akhir** kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Tembilahan, 01 Mei 2026

ELDA SEPITRI
NIM. 101221010018

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRACT

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR..... vii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah.....5

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II TELAAH PUSTAKA 8

2.1 Telaah Teoritis 8

2.1.1 Manajemen Keuangan.....8

2.1.2 Kinerja Keuangan.....9

2.1.3 Laporan Keuangan 11

2.1.4 Rasio Keuangan 14

2.1.5 Pengelolaan Alokasi Dana Desa 18

2.2 Penelitian Terdahulu 26

2.3 Kerangka Pemikiran 29

2.4 Hipotesis 30

2.5 Variabel Penelitian 31

BAB III METODE PENELITIAN 33

3.1 Objek dan Waktu Penelitian 33

3.2 Jenis dan Sumber Data 33

3.3	Populasi dan Sampel.....	34
3.4	Definisi Operasional Variabel	35
3.5	Teknik Pengumpulan Data	35
3.6	Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		40
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
4.1.1	Sejarah Singkat Desa Sencalang	40
4.1.2	Batas Wilayah Desa	41
4.1.3	Luas Wilayah Desa	41
4.1.4	Visi dan Misi Kantor Desa Sencalang	42
4.1.5	Struktur Organisasi	43
4.1.6	Uraian Tugas	43
4.2	Hasil Penelitian.....	46
4.2.1	Rasio Efektivitas	46
4.2.2	Rasio Pertumbuhan	50
4.3	Pembahasan	54
4.3.1	Rasio Efektivitas Dana Desa	54
4.3.2	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Dana Desa.....	55
4.3.3	Rasio Pertumbuhan Belanja Dana Desa	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1: Anggaran dan Realisasi Dana Desa Sencalang Kecamatan Keritang.....	3
Tabel 2. 1: Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah.....	16
Tabel 2. 2: Kriteria Tingkat Pertumbuhan PAD	18
Tabel 2. 3: Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2. 4: Variabel Penelitian.....	31
Tabel 3. 1: Operasional Variabel.....	35
Tabel 3. 2: Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah.....	37
Tabel 3. 3: Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah.....	38
Tabel 4. 1: Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 – 2025	47
Tabel 4. 2: Rasio Efektivitas Pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 - 2025	48
Tabel 4. 3: Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Kantor Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 - 2025.....	50
Tabel 4. 4: Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 - 2025	51
Tabel 4. 5: Rasio Pertumbuhan Belanja Dana Desa Pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 - 2025	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1: Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4. 1: Grafik Rasio Efektivitas pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 – 2025	49
Gambar 4. 2: Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 - 2025.....	52
Gambar 4. 3: Grafik Rasio Pertumbuhan Belanja dana Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 – 2025	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks pembangunan nasional, desa sebagai satuan pemerintahan paling kecil. Sejak ³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diterapkan, pemerintah pusat semakin serius memperhatikan pembangunan di tingkat desa. Salah satu wujud keseriusan tersebut adalah dialokasikannya Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini mencerminkan komitmen negara untuk mempercepat pembangunan sekaligus memberdayakan masyarakat di pedesaan, serta menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah desa dan kota. Sementara itu, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, berperan sebagai salah satu penggerak utama tercapainya kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Dana Desa (DD) mencerminkan relasi keuangan antar tingkat pemerintahan, khususnya antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Mekanisme penyaluran dana ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dengan prioritas pemanfaatan diutamakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana diatur dalam (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015), pemanfaatan Dana Desa wajib mengacu pada prinsip keadilan, kewenangan desa, prioritas kebutuhan, sumber daya desa, serta otonomi yang bersifat partisipatif. Desa memiliki kewenangan penuh untuk mengatur serta mengurus berbagai kepentingan

warganya, ¹ baik dalam bentuk pelayanan publik (*public goods*), regulasi (*public regulation*), maupun pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan Dana Desa, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kelancaran mobilitas, penyaluran hasil pertanian, serta kemudahan akses terhadap berbagai fasilitas pelayanan publik, seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

Fenomena ³ pengelolaan Dana Desa di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Berdasarkan catatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hingga tahun 2024 masih ditemukan berbagai kasus penyimpangan pengelolaan Dana Desa, mulai dari penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, ³ rendahnya tingkat penyerapan dana, hingga kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Fenomena ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan desa yang perlu segera diatasi.

Permasalahan utama dalam pengelolaan Dana Desa berkaitan dengan dua aspek, yaitu efektivitas dan pertumbuhan. Melalui indikator efektivitas, dapat dilihat sejauh mana pemerintah desa mampu dalam merealisasikan target penerimaan dan penggunaan Dana Desa sesuai yang telah direncanakan. Sementara itu, rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja ¹³ dari tahun ke tahun. Kedua indikator tersebut menjadi peran penting dalam ² menilai kinerja keuangan pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa yang ¹ merupakan faktor berguna dalam pengelolaan ADD. Namun kendalanya berupa terbatasnya kualitas sumber

daya manusia serta rendahnya pengawasan langsung dari masyarakat.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah desa juga menjadi permasalahan yang sering terjadi. Kondisi ini menyebabkan besarnya anggaran yang dialokasikan berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana. Pengelolaan Dana Desa yang belum transparan dan tidak pertanggungjawaban berisiko membuka celah terjadinya penyimpangan wewenang dan tindakan korupsi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat desa seperti sejumlah sektor kehidupan mulai dari bisnis, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Salah satu desa penerima Dana Desa secara rutin setiap tahunnya adalah ³Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Merujuk pada data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sencalang periode 2023-2025, terdapat dinamika yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait pengelolaan keuangan desa.

⁴**Tabel 1. 1:**

Anggaran dan Realisasi Dana Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 – 2025 (Rp)

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2023	622.703.200	622.703.200	1.892.681.904	1.757.523.302
2024	681.273.200	681.273.200	2.196.643.066	2.005.993.450
2025	820.877.200	820.877.200	1.736.640.553	1.483.599.041

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa anggaran serta realisasi penerimaan ³Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2023 – 2025. Namun, jumlah realisasi

belanja setiap tahun tidak selalu sama dengan anggaran yang ditetapkan, sehingga masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap secara optimal. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah desa juga menjadi permasalahan yang sering muncul. Besarnya anggaran yang dialokasikan justru berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang dan tindak korupsi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat desa itu sendiri. Padahal, pengelolaan dana yang baik dan terpusat semestinya dapat memperlancar ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, demi kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Baik-buruknya pengelolaan keuangan desa akan sangat menentukan tingkat efektivitas dan pertumbuhan kinerja keuangannya. Apabila pengelolaan dilakukan dengan optimal, hal tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan desa. Efektivitas kinerja keuangan desa mencerminkan ² sejauh mana pemerintah desa mampu merealisasikan serta mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan target yang telah ditentukan, dan dilakukan secara transparan, sedangkan pertumbuhan kinerja mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam menjaga dan meningkatkan kondisi keuangannya dari waktu ke waktu.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Yayu, 2019) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng 2015 – 2018” ditemukan bahwa kinerja keuangan pada pengelolaan Alokasi Dana termasuk dalam kategori baik, meskipun berdasarkan ³ rasio efektivitas berkategori cukup efektif. Penelitian serupa dilakukan oleh (Putri et al., 2024) ⁷ dengan judul

“Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, temuan riset memperlihatkan bahwa rasio efektivitas selama 2018 – 2022 berkategori efektif dengan efektivitas 100%. Sementara itu, rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja Alokasi Dana Desa tergolong rendah karena persentasenya di bawah 25%. Selanjutnya, riset yang dilakukan oleh (Karmila & Fauzan, 2023) dengan judul “Analysis of Financial Performance Management of Village Fund Allocation Based on Effectiveness and Growth Ratio in Sungai Ara Village 2020-2022”, memperlihatkan ⁴ bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Sungai Ara dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio efektivitas yang berada dalam kategori efektif, sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan masih berada pada kategori rendah pada setiap tahunnya.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada penggunaan ¹⁵ rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, serta periode penelitian yang digunakan. Mengacu pada uraian latar belakang serta hasil penelitian terdahulu tersebut, ⁷ peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan judul: **“Analisis Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sencalang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sencalang periode 2023 - 2025.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat Pertumbuhan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sencalang periode 2023 - 2025.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi, serta wawasan dan mengembangkan teori dalam kajian ilmu administrasi publik, dan fokus pada kebijakan dalam bidang otonomi daerah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pemerintahan, terutama pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya, sistematika penulisan berperan sebagai panduan sekaligus alat kontrol penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, sistematika

ini terbagi dalam beberapa bab, dengan uraian ² sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat penelitian, diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini mengulas landasan teori, kajian penelitian sebelumnya, kerangka berpikir, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi serta sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil temuan penelitian, beserta pembahasannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan beserta saran – saran yang relevan dengan pembahasan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berfungsi sebagai halaman untuk mencatat identitas sumber referensi yang telah digunakan dalam penelitian.

LAMPIRAN

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Telaah Teoritis

2.1.1 Manajemen Keuangan

Kata “Manajemen” berasal dari bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengelola atau mengatur. Konsep ini mencakup beberapa pertanyaan mendasar apa yang diatur, mengapa perlu diatur, siapa yang mengaturnya, dan bagaimana proses pengaturan itu dilakukan (Hasibuan, 2016). Dengan demikian, manajemen pada dasarnya merupakan rangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Menurut (Sujarweni, 2017 : 9-10) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian* mengatakan bahwa manajemen adalah sebagai proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi. Proses ini menuntut adanya pengendalian yang baik atas kegiatan operasional, dengan melibatkan pihak – pihak berwenang yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing – masing dalam mencapai tujuan bersama.

Sementara itu, keuangan dapat dipahami sebagai aktivitas yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengelola dana secara efektif dan efisien demi mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Manajemen keuangan sendiri upaya untuk memperoleh dana dengan biaya seminimal mungkin, kemudian

mengalokasikannya secara efektif agar mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut (Fauzan & Siti, 2023) Manajemen keuangan menjelaskan pengelolaan dua fungsi utama, yaitu penggalangan dana dan alokasi dana. Dalam hal ini, ²manajer keuangan berperan ²menentukan komposisi ²aset yang tepat untuk ²investasi serta memilih sumber pendanaan yang sesuai untuk biaya aset tersebut.

¹⁰Menurut (Musthafa, 2017:1) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan mengatakan bahwa dalam mempelajari manajemen keuangan (*financial management*) berarti memahami tiga jenis keputusan utama ¹⁰yaitu, keputusan investasi (*investment decision*), keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana (*financing decision*), dan keputusan kebijakan deviden (*dividend policy*) yang biasa juga disebut keputusan pembagian keuntungan (*distribution decision*). Bidang ini dinilai menarik karena membuka peluang karier yang luas, mulai dari corporate finance, perbankan, real estate, asuransi, hingga sektor pemerintahan.

2.1.2 Kinerja Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut (Jumingan, 2014:239) dalam (Yayu, 2019), mendefinisikan kinerja keuangan sebagai potret kondisi keuangan suatu pada periode tertentu, baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran dana, yang lazim diukur melalui indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Menurut (Fahmi, 2017:2), kinerja keuangan adalah sebagai bentuk analisis untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Melalui alat –

alat analisis keuangan, kondisi baik – buruknya suatu perusahaan dapat tergambar, sekaligus mencerminkan prestasi kerja yang dicapai dalam periode tersebut.

Sedangkan menurut (Mulyadi, 2016:415), memandang kinerja keuangan memandang kinerja keuangan sebagai penilaian periodik atas efektivitas operasional suatu organisasi beserta karyawannya, yang diukur berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah pencapaian prestasi suatu entitas dalam periode tertentu yang menggambarkan kesehatan keuangannya, diukur melalui indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas dengan bantuan analisis rasio keuangan.

2.1.2.2 Pengertian Kinerja Keuangan Desa

³ Kinerja keuangan desa merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan peraturan perundang – undangan selama satu periode anggaran (Abdul & Kusufi, 2017).

Menurut (Mahmudi, 2016:13), ⁴ kinerja keuangan desa adalah kemampuan pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan bantuan kepada masyarakat yang dinilai berdasarkan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan yang baik yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

Kinerja keuangan pemerintah desa dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap ⁸ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa). Analisis rasio keuangan APBDesa dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Halim, 2012).

2.1.2.3 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan Desa

Menurut Mahsun (Mahsun, 2016:25), tujuan penilaian kinerja keuangan desa adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
2. Untuk menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3. Untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment.
5. Sebagai alat untuk memotivasi pegawai.
6. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pegawai.

Berdasarkan uraian diatas, kinerja keuangan desa merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan Desa Sencalang akan diukur melalui ³ analisis Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan yang diterapkan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) periode 2023 – 2025.

2.1.3 Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Fahmi (2014:22) ² dalam (Sipahelut et al., 2017) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu perusahaan pada periode

tertentu, yang selanjutnya menjadi sumber informasi untuk menilai kinerja perusahaan tersebut. Sejalan dengan (Fauzan et al., 2023) menjelaskan bahwa fungsi laporan keuangan telah mengalami perubahan, semula hanya berperan sebagai alat pengujian pembukuan, kini menjadi dasar untuk menilai posisi keuangan perusahaan, sehingga pihak – pihak berkepentingan dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut.

¹ Menurut Budi Rahardjo (2016) dalam (Patricia et al., 2018), memandang laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajer perusahaan atas pengelolaan yang dipercayakan kepadanya, yang disampaikan kepada pihak berkepentingan (*stakeholder*) mulai dari pemilik perusahaan, pemerintah, lembaga pemberi kredit, hingga pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut.

2.1.3.2 Jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam (Patricia et al., 2018) jenis laporan keuangan terdiri atas :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

2.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut (Hery, 2020) menjelaskan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor maupun kreditor

dalam pengambilan keputusan, baik terkait investasi maupun pemberian kredit. Keberagaman jenis keputusan yang diambil oleh masing – masing pihak mempengaruhi metode pengambilan keputusan serta kemampuan mereka dalam mengolah informasi yang tersedia.

2.1.3.4 Analisis Laporan Keuangan

Menurut (Fauzan et al., 2023) laporan pada dasarnya adalah catatan tertulis mengenai aktivitas dan kondisi keuangan suatu bisnis, yang umumnya tersusun dari empat komponen utama. Menurut Harmono (2015, dalam Maharyani, 2018), analisis neraca digunakan bukan cuma melihat angka, tapi juga untuk membaca “kesehatan” lewat arus kasnya untuk memahami baik buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan. Hasil analisis memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan. Oleh karena itu, hasil ini sangat penting bagi bisnis untuk meningkatkan, melakukan penyesuaian, dan menerapkan penilaian.

Analisis neraca merupakan proses memisahkan pos – pos neraca menjadi bagian informasi lebih kecil dan mempertimbangkan hubungan esensialnya. (Harahap, 2011:190). Selain itu (Mutiara, 2016), menjelaskan bahwa menggabungkan antara data kuantitatif dan non – kuantitatif karena kombinasi keduanya memberi gambaran yang lebih utuh untuk pengambilan keputusan.

2.1.3.5 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan

1. Menentukan posisi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu termasuk aset, kewajiban, modal, dan laba operasi yang terjadi selama beberapa periode waktu.
2. Identifikasi kelemahan yang dimiliki perusahaan.

3. Mengetahui kekuatan dari kekuatan yang dimiliki perusahaan
4. Mengetahui tindakan perbaikan di masa depan terkait kondisi ¹keuangan perusahaan saat ini.
5. Apakah perlu diperbarui agar dianggap berhasil kinerja manajemen di masa depan.
6. Hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan yang sama. (Kasmir, 2014:104) dalam (Mutiara, 2016).

2.1.4 Rasio Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan pada dasarnya adalah teknik membandingkan suatu angka dengan angka lain dalam laporan keuangan, baik ²antar komponen dalam satu laporan maupun antar komponen dari laporan yang berbeda (Kasmir, 2016 dalam Sipahelut et al., ²2017).

Menurut Hery (2014 : 22) dalam (Yayu, 2019) mengatakan bahwa analisis rasio sebagai salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan sering digunakan. Meskipun perhitungannya ²tergolong sederhana secara aritmatika, interpretasi hasilnya justru membutuhkan ketelitian tersendiri.

¹Menurut (Sujarweni, 2017;109) dalam (Yayu, 2019) teknik analisis seperti ini berguna untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, baik dalam keadaan baik maupun buruk. Teknik ini bertujuan kepada perusahaan mengenali kekuatan dan kelemahan finansialnya, sekaligus memastikan sumber daya yang tersedia digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.4.2 Kegunaan Rasio Keuangan

Kegunaan Analisis Rasio Keuangan (*Use Of Financial Ratio*) menurut (Martono & Harjito, 2014) : Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (*stakeholders*) seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan manajemen sendiri. Laporan keuangan yang baik dan akurat dapat menyediakan informasi yang berguna antara lain dalam :

1. Keputusan investasi
2. Keputusan pinjaman
3. Penilaian arus kas
4. Evaluasi sumber daya ekonomi
5. Klaim atas sumber keuangan
6. Analisis perubahan yang terjadi dalam sumber daya keuangan
7. Menganalisis penggunaan dana, selain itu laporan keuangan tahunan yang baik memberikan informasi tentang posisi aset dan pendapatan masa lalu dan sekarang dapat memprediksi posisi aset dan pendapatan masa depan.

Analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah tentang analisis rasio keuangan. Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat dibedakan :

1. Perbandingan internal, bandingkan hubungan saat ini dengan hubungan masa lalu dan masa depan dari perusahaan yang sama.
2. Perbandingan eksternal (perbandingan pihak ketiga) lahir pada tahun dan sumber tokoh kunci industri, yaitu perbandingan tokoh kunci perusahaan dengan perusahaan sejenis atau sekaligus dengan rata – rata industri.

2.1.4.3 Jenis – Jenis Rasio Keuangan

Jenis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan pemerintahan daerah (Yayu, 2019) sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah mengukur kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Pengukurannya menggunakan rumus :

Rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi AAD}}{\text{Anggaran AAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1:

Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Kinerja Keuangan
Sangat Efektif	Diatas 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80-% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	Kurang dari 60%

Sumber : Mohammad Mahsun (2016:130)

2. Rasio Pertumbuhan

Menurut (Wonda, 2016) dalam (Yayu, 2019) menyatakan bahwa Rasio pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan

keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Dari penjelasan di atas maka dapat di gunakan rumus sebagai berikut:

Rumus :

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan (RPP)

$$RPP = \frac{\text{Realisasi Pendapatan ADD } X_n - \text{Pendapatan } X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan ADD } X_n - 1} \times 100\%$$

b. Rasio Pertumbuhan Belanja (RPB)

$$RPB = \frac{\text{Realisasi Belanja ADD } X_n - \text{Belanja } X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja ADD } X_n - 1} \times 100\%$$

Keterangan :

X_n : Tahun yang dihitung

$X_n - 1$: Tahun Sebelumnya

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai atau mengukur kinerja keuangan pemerintah dalam mempertahankan perekonomiannya dan meningkatkan perekonomian yang telah dicapai dalam satu periode berjalan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan untuk masing – masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, digunakan sebagai bahan evaluasi potensi mana yang perlu diperhatikan.

Tingkat pertumbuhan PAD diukur berdasarkan kriteria berikut (Sholeh, 2016) :

Tabel 2. 2:

Kriteria Tingkat Pertumbuhan PAD

Nilai Rasio	Kriteria
0% - 25%	Rendah
25% - 50%	Sedang
50% - 100%	Tinggi

Sumber : Sholeh, 2016

2.1.5 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

2.1.5.1 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang berikan Pemerintah Kabupaten untuk desa, dan bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten untuk desa sebagai bentuk penguatan masyarakat. ¹ Dana kompensasi merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menutupi kebutuhan daerah tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi. ¹ Sebagai hasil dari otonomi desa, anggaran juga dialokasikan untuk pengelolaan daerah, yang disebut dana desa (ADD).

¹ Agar kegiatan yang dibiayai dapat mencapai sasarannya sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat di desa yang bersangkutan, terdapat beberapa prinsip yang wajib dipegang dalam pengelolaan dana desa (ADD), antara lain :

1. Sumber pendanaan berasal dari Dana Desa, dan seluruh proses mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi berdasarkan ⁹ prinsip, dari, oleh

dan untuk masyarakat.

2. Setiap kegiatan serta ¹ penggunaan dana desa harus wajib dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis dan hukum.
3. Kegiatan yang dibiayai melalui alokasi dana desa mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, serta kegiatan lain yang diperlukan masyarakat, terutama dalam peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan masyarakat. Penetapan jenis kegiatan yang akan didanai wajib melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama
4. Penggunaan ¹ alokasi dana desa harus tercatat dalam APBD sesuai proses penganggaran yang telah ditetapkan

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada desa dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mendorong pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenngannya.
2. Meningkatkan kapasitas kelembgaan ¹ masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola pembangunan secara partisipatif, tergantung pada potensi desa.
3. Mendorong pemerataan pendapatan dari kesempatan kerja dan usaha di masyarakat wilayah pedesaan.
4. Mendorong terciptanya kerjasama swadaya masyarakat yang lebih baik.

Pemerintah berharap kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis memperkuat

masyarakat pedesaan dengan tetap menjaga pembangunan di tingkat desa. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk desa⁷ dan pendistribusiannya menggunakan transfer melalui APBD Kabupaten/Kota serta digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat serta kemasyarakatan.

¹¹ 2.1.5.2 Prioritas Alokasi Dana Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19). Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Ada tiga prinsip prioritas penggunaan Dana Desa (DJPPMD, 2015) yaitu:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
3. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa menurut Tipolgi Desa adalah :

1. Desa Tertinggal atau Sangat Tertinggal adalah tentang sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan; dan akses kehidupan masyarakat desa.
2. Desa berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
3. Desa Maju atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa; prakarsa desa membuka lapangan kerja; teknologi tepat guna; dan investasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Prioritas kegiatan pemberdayaan berdasarkan Tipologi Desa (DJPPMD), 2015) adalah sebagai berikut :

1. Desa Tertinggal atau Sangat Tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa.
2. Desa Berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau

proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan.

3. Desa Maju atau Mandiri, mengembangkan kegiatan pemerdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lambung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

2.1.5.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014 keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki setiap desa, dapat diukur dari sisi moneter termasuk uang dan barang. Dari ¹ hak dan kewajiban tersebut dapat menghasilkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Prinsip pengelolaan keuangan desa transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban dan disiplin anggaran (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014).

Menurut (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, ¹ 2014), pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan kegiatan yang terdiri perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Perencanaan menjadi tahap awal dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tahapan ini bertujuan untuk merumuskan rangkain

kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pertama, tiap dusun akan menyelenggarakan Musyawarah Dusun (Musdus) sebagai forum untuk menghimpun berbagai ⁵usulan warga terkait program kerja. (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, ⁸2014).

Dokumen perencanaan keuangan desa memuat RPJM desa dan RKP desa berdasarkan rencana pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Perundingan desa akan berlangsung paling lambat Juni tahun ini. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa akan dilakukan secara partisipatif dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dengan partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur Masyarakat Desa. RPJM Desa tersebut terkait dengan RPJM Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM desa akan ditetapkan paling lama tiga bulan setelah walikota menjabat. RKP Desa merupakan pengembangan satu tahun dari RPJM Desa. RKP Desa meliputi rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penguatan masyarakat desa.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada

masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) (Diansari, 2015) dikutip dalam (Yayu, 2019).

Pelaksanaan anggaran desa yang sebelumnya ditetapkan pada tahun menghasilkan transaksi pendapatan dan belanja desa. Seluruh pendapatan dan pengeluaran desa sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan desa diproses melalui rekening kas desa. Jika desa tersebut belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, maka rezimnya akan ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Seluruh pemasukan dan pengeluaran desa harus disertai bukti pendukung yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan mencakup seluruh pemasukan dan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab bendahara desa. Kepala desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, diwajibkan menetapkan bendahara desa sebelum dimulai, dan pengangkatan tersebut harus didasarkan pada APBD sebagai bagian dari pelaksanaan akuntansi desa.

Bendahara desa memiliki kewajiban⁵ menjelaskan laporan tahunan akan disampaikan kepada walikota desa paling lambat 10 bulan berikutnya setiap bulan. Pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara Desa adalah :

a) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan mencatat transaksi tunai maupun kredit termasuk mencatat berbagai aktivitas yang berikatan dengan penyetoran dan penarikan, serta mencatat kesalahan perbankan dan akuntansi. Buku kas umum dapat dianggap sebagai sumber dokumen transaksi.

b) Buku Kas Pembuatan Pajak

Buku pajak berperan sebagai pendukung buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c) Buku Bank

Buku Bank berfungsi sebagai pendukung buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Pelaporan

Pelaporan kegiatan anggaran desa terbagi menjadi dua jenis. Pertama, laporan berkala mengenai pelaksanaan penggunaan ADD, yang disusun setiap semester (enam bulan sekali), disesuaikan dengan tingkat penyerapan, ⁴ pertanggungjawaban, termasuk realisasi

pendapatan dan belanja ADD. Kedua, laporan akhir penggunaan ADD berisi penggunaan dana, permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

5. Pertanggung Jawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban terkait pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Laporan pertanggungjawaban tersebut wajib disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berakhir dan ditetapkan melalui peraturan desa. Peraturan desa yang dimaksud disertai dengan :

- a) Laporan Keuangan, yang terdiri atas :
 - 1) Laporan realisasi APBDesa
 - 2) Catatan atas laporan keuangan
- b) Laporan realisasi kegiatan
- c) Daftar program sektoral, program daerah, serta program lain yang masuk ke desa.

2.2 ² Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan untuk membandingkan data – data penelitian, peneliti memulai tinjauan pustaka dengan melihat penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dengan melakukan penelitian ini, mendapatkan rujukan sebagai pendukung, pelengkap, dan pembanding yang

relevan untuk melakukan penelitian yang lebih memadai, menjadi referensi penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 2.3: Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Karmila & Fauzan, 2023)	Analysis of Financial Performance Management of Village Fund Allocation Based on Effectiveness and Growth Ratio in Sungai Ara Village 2020-2022.	X_1 : Rasio Efektivitas X_2 : Rasio Pertumbuhan Y : Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Analisis Data: Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan rumus rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.	Hasil penelitian membuktikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Sungai Ara secara umum sudah baik dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Rasio Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2020-2022 berkategori efektif. Sementara itu, Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD menunjukkan hasil yang fluktuatif namun masih tergolong rendah setiap tahunnya karena berada di bawah 25%.
2.	(Putri et al., 2024)	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir	X_1 : Rasio Efektivitas X_2 : Rasio Pertumbuhan Y : Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Analisis Data: Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif	Hasil penelitian membuktikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Sungai Baru sudah baik dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Rasio Efektivitas Dana Desa selama tahun 2018-2022 berkategori efektif karena mencapai 100%, sedangkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan

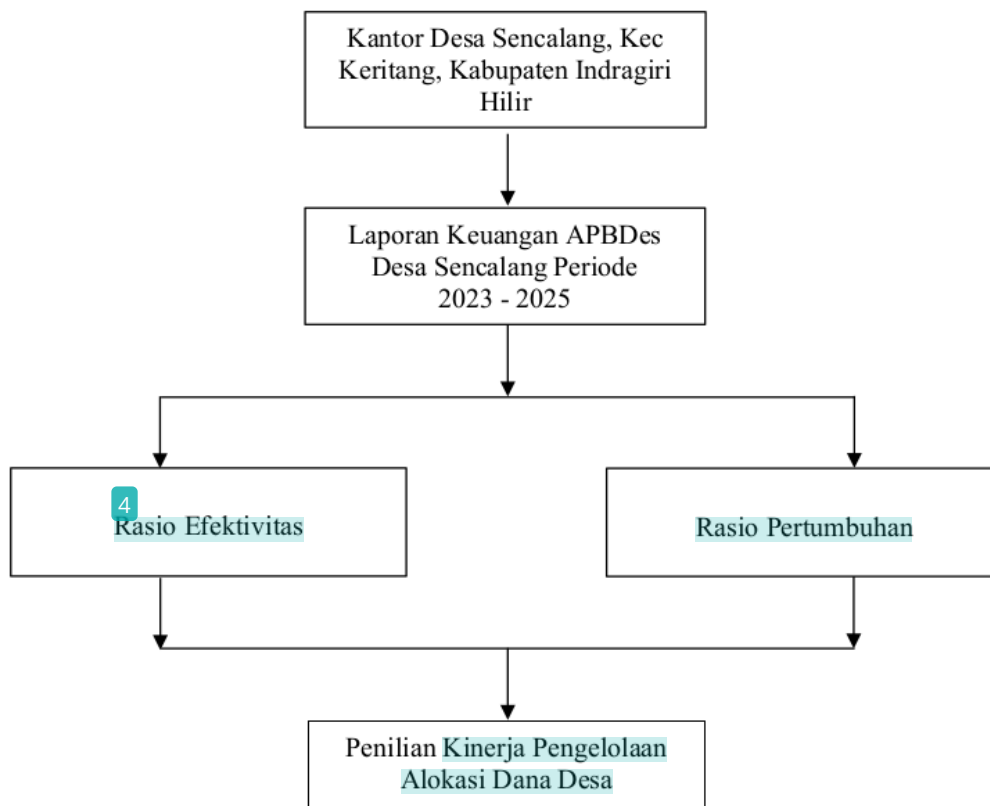
No	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			13 kuantitatif dengan rumus rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan	Belanja ADD dikategorikan rendah karena berada di bawah 25%.
3.	(Yayu, 2019)	2 Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng.	X : Kinerja Keuangan Y : Alokasi Dana Desa Y2 : Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Analisis Data : Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan rumus efektivitas dan rasio pertumbuhan.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng dari tahun 2015 – 2018 sudah baik. Jika dilihat dari rasio Efektivitas dikategorikan Cukup Efektif.
4.	(Supriati, 2021)	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapang Hulu Kabupaten, Kampar	X : Kinerja Keuangan Y: Pengelolaan Alokasi Dana Desa Y2 : Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Analisis Data : Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan rumus rasio	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapang Hulu Kabupaten, Kampar secara 13 seluruhan 4 tergolong baik dalam mengelola keuangan alokasi dana desa. Dimana efektivitas dana desa provinsi Riau selama tahun 2016 – 2020 berkategori baik.

No	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			efektivitas dan rasio pertumbuhan.	
5.	(Salmah, 2024)	Analisis Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Corawali Kabupaten Sidrap	X1 : Rasio Efektivitas X2 : Rasio Pertumbuhan Y : Kinerja Keuangan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan rumus efektivitas dan rasio pertumbuhan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada Desa Corawali Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap dilihat dari rasio efektivitasnya cukup efektif, dan jika dilihat dari rasio pertumbuhannya menghasilkan nilai 4,4, karena kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima pemerintah Desa Corawali Kabupaten Sidrap.

Sumber: dari beberapa penelitian terdahulu, 2019 - 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sidik Priadina dan Denok Sunarsi (2021) Kerangka Berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.



Gambar 2. 1: Kerangka Pemikiran

2.4 ² Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada penelitian. Hipotesis disebut sebagai hasil sementara dalam penelitian karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan dari pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat didefinisikan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dari pada sebagai jawaban empiris (Priadana, M. S., & Sunarsi, 2021).

1. Diduga ⁴ pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sencalang diukur dengan Rasio Efektivitas sudah efektif.

2. Diduga pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sencalang jika diukur dengan Rasio Pertumbuhan memiliki kriteria yang tinggi.

2.5 Variabel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yaitu “Analisis Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sencalang Periode 2023 – 2025”, terdapat dua jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya variabel terikat, yang biasanya diberi simbol X. Sedangkan variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas, yang biasanya diberi simbol Y. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel independen (X1) : Rasio Efektivitas
2. Variabel independen (X2) : Rasio Pertumbuhan
3. Variabel dependen (Y) : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sencalang

Tabel 2. 4: Variabel Penelitian

Variabel	Rumus	Skala
Efektivitas Dana Desa (X1)	$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$	Rasio

Variabel	Rumus	Skala
Pertumbuhan Dana Desa (X2)	$RPP = \frac{\text{Realisasi Pendapatan ADD } X_n - \text{Pendapatan } X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan ADD } X_{n-1}} \times 100\%$ $RPB = \frac{\text{Realisasi Belanja ADD } X_n - \text{Belanja } X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja ADD } X_{n-1}} \times 100\%$	Rasio
Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Laporan Realisasi APBDes (Pendapatan & Belanja ADD)	Rasio

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Waktu Penelitian

3.1.1 Objek Penelitian

Pengertian objek penelitian yaitu, suatu objek atau kegiatan yang memiliki variabel tertentu untuk penelitian dan menarik kesimpulan. Objek penelitian ini dilaksanakan pada Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

3.1.2 Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian, waktu penelitian dimulai sejak penulis mendapatkan persetujuan judul dan membuat proposal.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah, jenis penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angka dari laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Menurut (Sugiyono, 2017 : 8) metode kuantitatif adalah metode yang berdasar filsafat positivisme, bertujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang dibuat peneliti. Penelitian kuantitatif memuat banyak angka mulai dari pengumpulan, pengolahan, serta hasil yang didominasi angka. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data laporan keuangan APBDes Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

3.2.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pengolahan peneliti sendiri, yaitu berupa Rasio Kinerja Keuangan yang dihitung berdasarkan laporan keuangan Desa tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dalam bentuk jadi dan diperoleh secara langsung oleh peneliti ke desa, yaitu berupa sejarah umum Desa dan laporan keuangan tahunan desa periode 2023-2025 yang diperoleh melalui Kepala Urusan Keuangan Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Dalam buku (Sugiyono, 2017 : 80), Metode Penelitian menyatakan bahwa populasi adalah area generalisasi di mana peneliti memilih objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu, untuk dipelajari dan kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di kantor Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir sebagai subjeknya.

3.3.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2017 : 81) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, sampel adalah komponen dari populasi secara keseluruhan dan atributnya. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu

mengambil seluruh data populasi yaitu laporan keuangan Dana Desa (DD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, periode 2023 – 2025.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan uraian definisi konseptual di atas maka diperoleh operasional variabel yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1: Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Rumus	Skala
Efektivitas	Menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang direncanakan, dibandingkan anggaran yang ditetapkan. Menurut (Yayu, 2019)	$\frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$	Rasio
Pertumbuhan	Digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode. Menurut (Wonda, 2016)	a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD $\frac{\text{Realisasi Pendpt ADD Xn} - \text{Pendapatan Xn-1}}{\text{Realisasi Pendapatan ADD Xn-1}} \times 100\%$ b. Rasio Pertumbuhan Belanja ADD $\frac{\text{Realisasi Belanja ADD Xn} - \text{Belanja Xn-1}}{\text{Realisasi Belanja ADD Xn-1}} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Data Olahan, 2026

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2017 : 224) Teknik pengumpulan data menjadi langkah yang paling strategis dalam penelitian., karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada ³Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir periode 2023 – 2025.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sencalang, Kecamatan Keritang , Kabupaten Indragiri Hilir periode 2023 – 2025 ¹³yang diperoleh langsung dari Kantor Desa Sencalang.

3.6 Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ⁷merupakan penelitian yang datanya disajikan dalam bentuk variabel dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah memberikan pendekatan kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Adapun langkah – langkah analisis data yang digunakan untuk menilai ¹⁰Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio

Pertumbuhan Pada Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri

Hilir dalam penelitian ini antara lain :

1. Pengumpulan laporan data Keuangan Desa yang terkait dengan variabel penelitian
2. Menghitung masing – masing rasio dan menentukan kriteria dalam keuangan daerah yang ditetapkan sebagai variabel penelitian.

3.6.1 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola ¹ Alokasi Dana Desa (ADD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

Tabel 3. 2: Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Kinerja Keuangan
Sangat Efektif	Diatas 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	Kurang dari 60%

Sumber : Mohammad Mahsun (2016:130) dalam ((Yayu, 2019)

3.6.2 Rasio Pertumbuhan

Menurut (Wonda, 2016:198) mengatakan bahwa Rasio Pertumbuhan digunakan untuk mengukur sejauh mana ¹ kemampuan pemerintah daerah dalam

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah diraih dari suatu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan semakin baik.

Dari penjelasan di atas maka dapat digunakan rumus sebagai berikut :

1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan (RPP)

$$RPP = \frac{\text{Realisasi Pendapatan ADD } X_n - \text{Pendapatan } X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan ADD } X_{n-1}} \times 100\%$$

2. Rasio Pertumbuhan Belanja (RPB)

$$RPB = \frac{\text{Realisasi Belanja ADD } X_n - \text{Belanja } X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja ADD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

X_n = Tahun yang dihitung

$X_n - 1$ = Tahun sebelumnya

5 Tingkat pertumbuhan PAD diukur berdasarkan kriteria berikut (Zuhri & Soleh, 2016).

Tabel 3. 2: Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Nilai Rasio	Kriteria
0% - 25%	Rendah
25% - 50%	Sedang
50% - 100%	Tinggi

Sumber : Sholeh, 2016

3. Menarik kesimpulan pengelolaan alokasi dana desa yang telah dianalisis

sesuai dengan standar perhitungan³ berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 ⁶ Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Sencalang

Secara administratif, Desa Sencalang berada dalam wilayah Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tepatnya dibagian Selatan , dan dikenal sebagai ⁶ salah satu desa dengan potensi ekonomi yang terus berkembang. Desa ini mulai terbentuk sekitar tahun 1970- an, sebagai hasil pemekaran dari Kota baru Seberida.

Pembentukan desa ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, diantaranya kebutuhan ⁶ pemerataan pembangunan yang saat itu belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, dikarenakan luasnya Desa induk Kota Baru Seberida dan faktor pendukung lain pembentukan desa seperti mempunyai desa untuk memanajementi pemerintahan sendiri dengan tak terlepas melihat potensipotensi yang dimiliki. Baik itu potensi individu putra daerah ataupun potensi-potensi alam sekitar yang dapat memenuhi pendapatan desa pada saat itu, makanya tokoh masyarakat Desa Sencalang berfikir memandang perlu dan begitu pentingnya punya pemerintahan desa sendiri tanpa harus diperintah atau berinduk pada desa lain.

Salah satu tokoh perintis dalam pembentukan Desa Sencalang bernama Bapak Sman, yang dikenal sebagai tokoh masyarakat setempat. Sebagai putra daerah, beliau selalu memperhatikan perkembangan kondisi wilayah dan memandang perlunya pemerintahan desa yang berdiri sendiri. Melalui pengamatan

dan pertimbangan matang, beliau tergerak untuk mewujudkan pemerintahan desa mandiri dan merumuskan berbagai strategi pembentukannya. Berkat dukungan moral dan materil dari masyarakat setempat, serta upaya musyawarah gagasan pentingnya pemerintahan yang dipimpin oleh putra daerah, perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan terbentuknya Desa Sencalang.

4.1.2 Batas Wilayah Desa

Desa Sencalang secara geografis berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Desa Pancur

Sebelah Selatan : Desa Petalongan

Sebelah Barat : Desa Petalongan

Sebelah Timur : Desa Pancur

4.1.3 Luas Wilayah Desa

1. Lahan pekarangan pemukiman Rakyat 45 Hektar
2. Lahan perkebunan Rakyat 7.987 Hektar
3. Lahan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit PT. MG 1.500 Hektar
4. Lahan yang dipergunakan jalan umum Provinsi, Kabupaten maupun jalan desa
5. Aliran sungai
6. Kawasan danau dan rawa – rawa 25 Hektar.

Secara topografi, Desa Sencalang umumnya berupa dataran yang dipenuhi perkebunan khususnya kelapa sawit, dengan iklim tropis yang mempengaruhi pola perekonomian masyarakat setempat.

4.1.4 Visi dan Misi Kantor Desa Sencalang

1. Visi

Visi merupakan gambaran menantang mengenai keadaan masa depan yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan potensi serta kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sencalang ini dilakukan secara pendekatan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa serta masyarakat desa pada umumnya. Selain itu, aspek eksternal seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Berdasarkan hal tersebut Visi Desa Sencalang adalah : “Terwujudnya desa yang sejahtera dengan sumber kekuatan gotong royong dan kebersamaan berlandaskan iman dan takwa.”

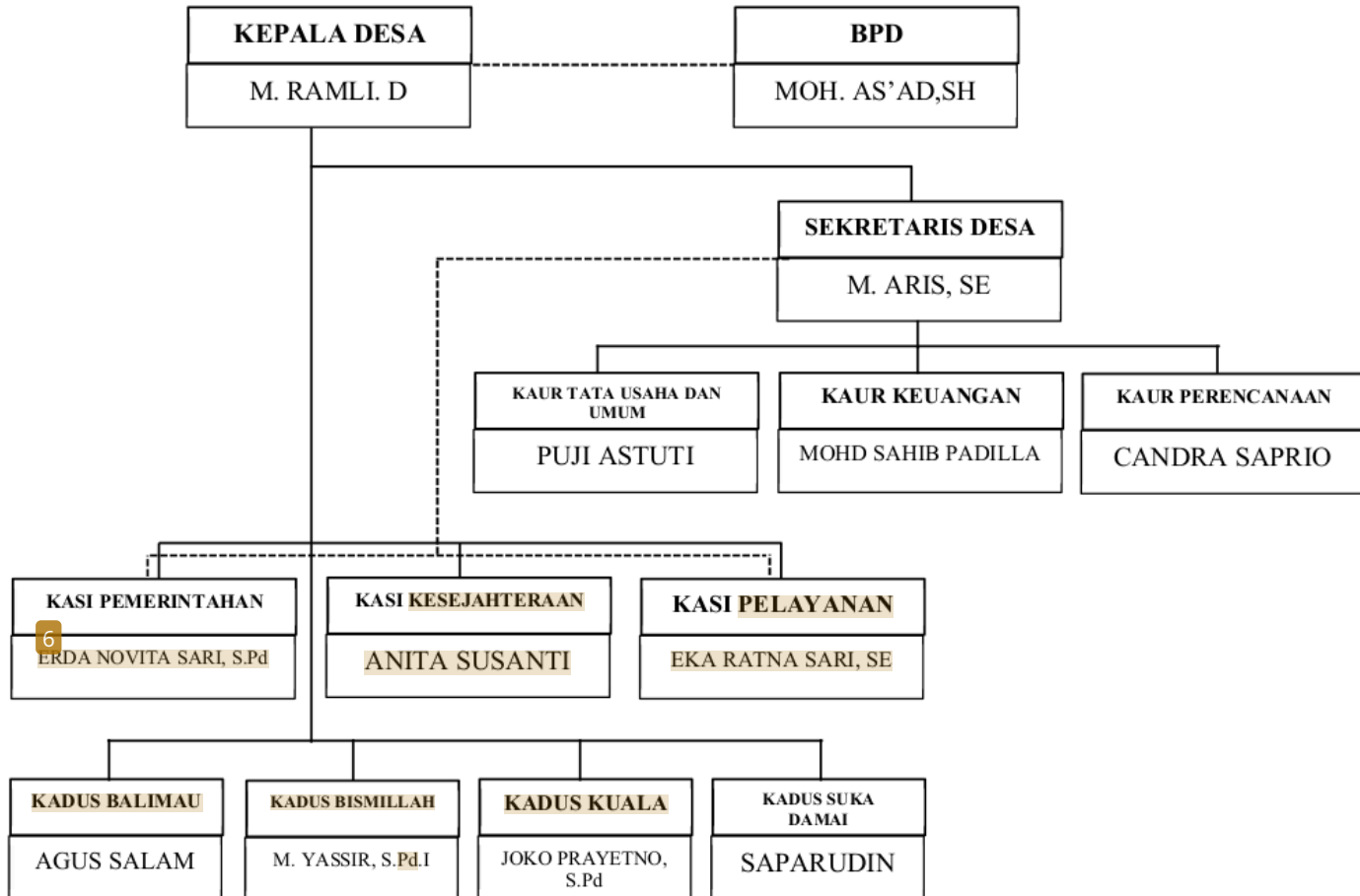
2. Misi

Adapun misi dari Desa Sencalang sebagai berikut :

- a) Mengamalkan dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari
- b) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparat berkualitas, potensial dan berjiwa prima.
- c) Meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan semangat gotong royong.

4.1.5 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dari Kantor Desa Sencalang sebagai berikut :



4.1.6 Uraian Tugas

1. Kepala Desa

Kepala Desa berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam Penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa bertanggung jawab dalam menjalankan urusan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk menjalankan tugas – tugas tersebut, Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi tata praja pemerintahan, penetapan berbagai peraturan desa, pembinaan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Menjalankan program pembangunan, termasuk pembangunan sarana prasarana perdesaan, serta pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
- c) Melakukan pembinaan kemasyarakatan, mencakup pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, keagamaan, serota bidang ketenagakerjaan.
- d) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat, meliputi sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, hingga karang taruna.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris memiliki tugas untuk ¹² membantu Kepala Desa, khususnya dalam urusan administrasi pemerintahan. Adapun fungsi Sekretaris Desa meliputi:

- a) Menjalankan urusan ketatausahaan seperti pengelolaan tata naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan, serta ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum, mencakup penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana dan prasarana perangkat desa

serta kantor, persiapan rapat, pengelolaan administrasi aset, investarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c) Melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir⁶ dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Tata Usaha dan Umum

Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai tugas seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

4. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

5. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan mempunyai tugas mengkoordinasikan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

6. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pendukung kepala desa yang bertugas menjalankan fungsi operasional. Struktur ini dipimpin oleh beberapa saksi, yaitu saksi pemerintahan, pelayanan dan seksi kesejahteraan yang menjakan tugas sesuai bidangnya.

4.2 Hasil Penelitian

Analisis kinerja keuangan kantor Desa Sencalang, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam penelitian ini merupakan bentuk evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang keuangan. Rasio yang digunakan penulis untuk menganalisis kinerja keuangan kantor Desa Sencalang Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan.

Penelitian ini menggunakan data berupa laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan kantor Desa Sencalang Kabupaten Indragiri Hilir selama tiga tahun terakhir, yakni periode (2023 – 2025). Berikut hasil analisis rasio yang diperoleh :

4.2.1 Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) menggambarkan kemampuan

pemerintah desa dalam merealisasikan ADD yang telah direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan, berdasarkan potensi rill desa. Semakin tinggi nilai Rasio efektivitas, maka semakin baik pula kinerja pemerintah desa.

Kinerja pemerintah Desa Sencalang dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan berada pada rentang 90 – 100%, yang berarti anggaran yang disediakan hampir sama dengan realisasinya, sehingga kinerja keuangan desa semakin baik. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio efektivitas yang diperoleh, semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa tersebut.

Perhitungan Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

Laporan keuangan Alokasi Dana Desa pada kantor Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 1:

Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023-2025

Tahun	Anggaran ADD (Rp)	Realisasi ADD (Rp)
2023	622.703.200	622.703.200
2024	681.273.200	681.273.200
2025	820.877.200	820.877.200

Sumber: Data Olahan, 2026

Perhitungan Rasio Efektivitas Kantor Desa Sencalang Kecamatan Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 - 2025 adalah sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2023} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

$$= \text{Rp. } \frac{622.703.200}{622.703.200} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

$$\text{Tahun 2024} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

$$= \text{Rp } \frac{681.273.200}{681.273.200} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

$$\text{Tahun 2025} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

$$= \text{Rp } \frac{820.877.200}{820.877.200} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

2
Tabel 4. 2:

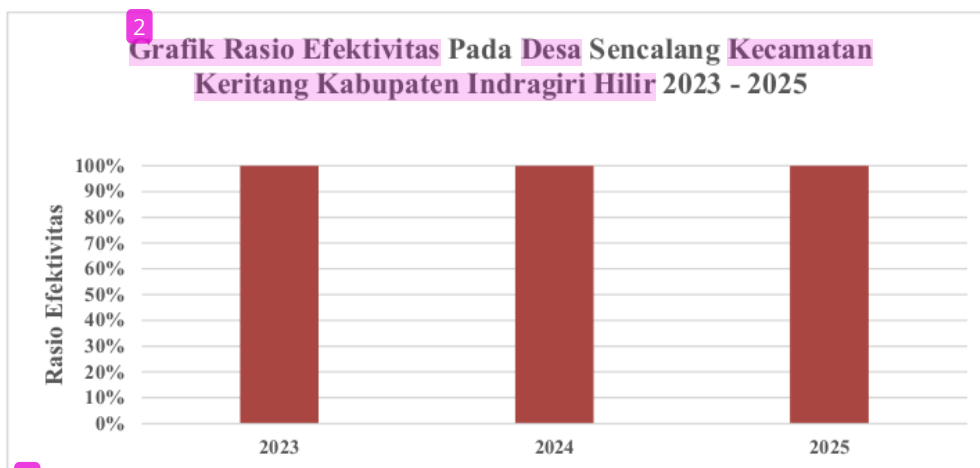
Rasio Efektivitas pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 - 2025

Tahun	Anggaran ADD (Rp)	Realisasi ADD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2023	622.703.200	622.703.200	100,00%	Efektif
2024	681.273.200	681.273.200	100.00%	Efektif
2025	820.877.200	820.877.200	100.00%	Efektif

Sumber: Data Olahan, 2026

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pada Desa Sencalang, Kabupaten Indragiri Hilir, selama periode 2023 - 2025 tergolong efektif dengan nilai rasio 100%. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan pembangunan, baik infrastruktur maupun non infrastruktur. Rasio Efektivitas Dana Desa Sencalang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebesar 100% pada tahun 2023 – 2025.

Sebaliknya, apabila Alokasi Dana Desa tidak dikelola secara efektif artinya anggaran dana desa tidak dapat terealisasi dengan baik, maka pelaksanaan pembangunan di desa tersebut akan mengalami hambatan, bahkan mengalami penurunan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menghambat perkembangan desa secara keseluruhan, karena alokasi anggaran untuk pembangunan tidak terserap secara maksimal.



2 Gambar 4. 1: Grafik Rasio Efektivitas pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 – 2025

Berdasarkan grafik 4.1 diatas, terlihat bahwa persentase Rasio Efektivitas pada Desa Sencalang 7 Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan angka 100% secara konsisten selama periode 2023 - 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sencalang sudah sepenuhnya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, tanpa ada kekurangan maupun kelebihan penerimaan. Berdasarkan kriteria efektivitas keuangan daerah menurut (Mahsun, 2016 : 130), rasio 90 – 100% dikategorikan efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Desa Sencalang dalam mengelola Alokasi

4
Dana Desa sudah efektif.

4.2.2 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan Dana Desa (ADD) menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan dari Dana Desa dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi rasio pertumbuhan pendapatan ini, maka kinerja pemerintah desa dapat dikategorikan semakin baik.

1 Dengan kata lain, rasio pertumbuhan Dana Desa yang tinggi maka kinerja keuangan pemerintah desa juga semakin baik. Perhitungan rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RPP = \frac{\text{Realisasi Pendapatan ADD } X_n - \text{Pendapatan } X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan ADD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Adapun data laporan keuangan Alokasi Dana Desa pada Kantor Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 3:

Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kantor Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 – 2025

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)
2022	553.121.000	1.600.443.150
2023	622.703.200	587.267.200
2024	681.273.200	724.784.200
2025	820.877.200	819.963.200

1
Sumber: Data Olahan, 2026

Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan di Kantor Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 – 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2023} &= \text{Rp } \frac{622.703.200 - 553.121.000}{\text{Rp } 553.121.000} \times 100\% \\ &= 12,58\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2024} &= \text{Rp } \frac{681.273.200 - 622.703.200}{\text{Rp } 622.703.200} \times 100\% \\ &= 9,40\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2025} &= \text{Rp } \frac{820.877.200 - 681.273.200}{\text{Rp } 681.273.200} \times 100\% \\ &= 20,49\%\end{aligned}$$

4
Tabel 4. 4:

Rasio Pertumbuhan Pendapatan pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 - 2025

Tahun	Realisasi Pendapatan ADD Xn (Rp)	Realisasi Pendapatan ADDXn -1 (Rp)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)	Kriteria
2023	622.703.200	553.121.000	12,58%	Rendah
2024	681.273.200	622.703.200	9,40%	Rendah
2025	820.877.200	681.273.200	20,49%	Rendah

Sumber: Data Olahan, 2026



Gambar 4. 2: Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 – 2025

Berdasarkan tabel 4.4 dan grafik 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan pendapatan pada Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2023 – 2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 12,58%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 9,40%, dan kembali meningkat signifikan di tahun 2025 menjadi 20,49%. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan pada tahun 2023 – 2025 berkategori rendah karena $< 25\%$.

Apabila pertumbuhan pendapatan Alokasi Dana Desa Rendah artinya Anggaran Dana Desa belum terealisasi dengan baik, dengan demikian pembangunan di desa tersebut belum berjalan dengan baik, sehingga desa tersebut belum dapat berkembang sebagaimana mestinya karena realisasi pendapatan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan semakin Rendah tiap tahunnya.

Rasio Pertumbuhan Belanja Dana Desa (ADD) menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola belanja yang berasal dari Dana Desa dibandingkan dengan realisasi Belanja Dana Desa pada tahun sebelumnya. Rasio

Pertumbuhan Belanja dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja ADD Xn} - \text{Belanja Xn-1}}{\text{Realisasi Belanja ADD Xn-1}}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2023} &= \text{Rp } \frac{1.757.523.302 - 1.600.443.150}{1.600.443.150} \times 100\% \\ &= 9,81\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2024} &= \text{Rp } \frac{2.005.993.340 - 1.757.523.302}{1.757.523.302} \times 100\% \\ &= 14,14\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2025} &= \text{Rp } \frac{1.483.599.041 - 2.005.993.340}{2.005.993.340} \times 100\% \\ &= - 26,04\% \end{aligned}$$

4 Untuk mengetahui tentang rasio Pertumbuhan Belanja Dana Desa di Desa

Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 5:

**Rasio Pertumbuhan Belanja dana Desa Sencalang Kecamatan Keritang
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 - 2025**

Tahun	Realisasi Belanja ADD Xn (Rp)	Realisasi Pendapatan ADDXn -1 (Rp)	Rasio Pertumbuhan Belanja Desa (%)	Kriteria
2023	1.757.523.302	1.600.434.150	9,81%	3 Rendah
2024	2.005.993.450	1.757.523.302	14,14%	Rendah
2025	1.483.599.041	2.005.993.350	-26,04%	Rendah

Sumber: Data Olahan, 2026



Gambar 4. 3: Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 – 2025

Berdasarkan tabel 4.5 dan grafik 4.3 dapat dilihat bahwa Rasio Pertumbuhan Belanja Dana Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, selama Tahun 2023 - 2025 menunjukkan 9,81%, 14,14% hingga -26,04% Rasio Pertumbuhan Belanja Dana Desa tersebut berkategori rendah.

Rendahnya pertumbuhan belanja desa artinya penggunaan Dana Desa belum terealisasi dengan baik, dengan demikian pembangunan di desa tersebut belum berjalan dengan baik. Pembangunan desa belum berkembang sebagaimana mestinya karena realisasi belanja Alokasi Dana Desa untuk pembangunan semakin rendah setiap tahunnya dan belum optimal.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Rasio Efektivitas Dana Desa

Laporan Alokasi Dana Desa (ADD) Kantor Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa anggaran mengalami peningkatan di tahun 2023 dan penurunan kembali di tahun 2025. Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas Dana Desa Kantor Desa Sencalang sudah efektif.

Efektivitas kinerja keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Dana Desa yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efektivitas Dana Desa di Desa Sencalang selama tahun 2023 - 2025 menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Desa Sencalang dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah efektif karena nilai Rasio Efektivitasnya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Sencalang tergolong baik dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa yang telah direncanakan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yayu, 2019) di Desa Jampu Kabupaten Soppeng, jika dilihat dari Rasio Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) tergolong cukup efektif, karena rata – rata efektivitasnya adalah sebesar 82,02%. Berbeda dengan hasil penelitian ini dimana kinerja keuangan ADD Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah sangat efektif karena nilai rasio efektivitasnya mencapai 100% setiap tahun selama periode 2023 – 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sencalang mampu merealisasikan seluruh anggaran Dana Desa sesuai dengan yang telah direncanakan secara konsisten setiap tahunnya.

4.3.2 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Dana Desa

Laporan Alokasi Dana Desa (ADD) Kantor Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami fluktuasi dari tahun 2023 – 2025. Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Dana Desa diketahui bahwa rasio pertumbuhan pendapatan berkategori rendah pada tahun 2023 – 2025. Untuk tahun

2023 itu sebesar 12,58% kemudian di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 9,40% dan di tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan 20,49%.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Dana Desa, di Desa Sencalang selama tahun 2023 – 2025 menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Desa Sencalang dalam meningkatkan penerimaan Alokasi Dana Desa ³ belum optimal, karena seluruhnya masih berkategori rendah dibawah 25%.

Rendahnya Rasio Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa selama periode 2023 – 2025 disebabkan besaran ADD yang diterima Desa Sencalang sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan formula Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, semakin tinggi DAU kabupaten maka semakin besar pula ADD yang diterima oleh Desa Sencalang. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan pendapatan ADD tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah desa dan hanya bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, sehingga pertumbuhannya cenderung rendah dan berfluktuasi ³ setiap tahunnya. Hal ini ⁷ menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Sencalang tergolong rendah dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan Alokasi Dana Desa yang telah direncanakan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Sencalang, ⁴ menunjukkan bahwa kinerja pendapatan bernilai negatif, kondisi ini disebabkan karena Desa Sencalang belum mampu dalam merealisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) secara efektif yang bersumber dari :

- ¹ 1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan pendapatan asli desa

lainnya yang sah.

2. Sekurang – kurangnya 1,0% (10%) penerimaan pajak daerah bagian pajak dari desa dan pemerintah akan dialokasikan ke desa
3. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintahan untuk desa paling sedikit 1,0% (10%) dan akan dibagikan secara profesional masing – masing desa, yaitu Alokasi Dana Desa.
4. Bantuan keuangan kepada pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait penyelenggaraan operasional pemerintahan.
5. Hadiah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

4.3.3 Rasio Pertumbuhan Belanja Dana Desa

¹ Laporan Alokasi Dana Desa (ADD) Kantor Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan pada tahun 2024. Rasio Pertumbuhan Belanja Dana Desa Sencalang ¹³ pada tahun 2023 dan 2025 sangat rendah, dibandingkan dengan Belanja Dana Desa 2024. Penurunan Rasio Pertumbuhan Belanja mencapai angka negatif -26,04% pada tahun 2025 disebabkan oleh dua hal yang terlihat jelas dari data. Pertama, anggaran belanja tahun 2025 ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran belanja tahun 2024 yaitu dari Rp 2.196.643.066 turun menjadi Rp 1.736.640.553 sehingga belanjanya lebih kecil dari awal. Kedua, realisasi belanja pada tahun 2025 juga tidak mampu menyerap anggaran secara penuh yaitu hanya terealisasi sebesar Rp 1.483.599.041 dari anggaran Rp 1.736.640.553, sehingga kombinasi kedua faktor inilah yang menyebabkan Rasio Pertumbuhan Belanja menjadi negatif apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024. ¹ Hal ini menunjukkan bahwa

pertumbuhan Belanja Dana Desa mengalami fluktuasi setiap tahun. Artinya kinerja keuangan Desa Sencalang¹ ditinjau dari pengelolaan Belanja Dana Desa belum baik karena menunjukkan adanya fluktuasi dalam Belanja Dana Desa setiap tahun.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, menunjukkan Rasio Pertumbuhan Belanja yang rendah. Artinya bahwa kinerja Desa Sencalang⁵ dalam mengelola Dana Desa dinilai rendah, karena realisasi Alokasi Dana Desa belum terserap secara maksimal dalam kegiatan pembangunan desa.

¹ Pengelolaan pengeluaran⁶ di Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir¹ direncanakan sebaik mungkin baik dari segi dasar hukum, program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan rencana pelaksanaannya.¹ Rencana pelaksanaan mencakup program, besaran anggaran yang digunakan, serta tujuan program pelaksanaan atau tujuan yang harus dicapai melalui setiap kegiatan. Total Anggaran Belanja yang dialokasikan dalam APBDesa untuk setiap program atau kegiatan telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa¹ dan harus ditutup dengan pendapatan yang diharapkan dapat dihasilkan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan pengeluaran Desa Sencalang dinilai rendah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan hasil dari penelitian sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Rasio Efektivitas selama tahun 2023 – 2025 berkategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Desa Sencalang dalam mencapai target Alokasi Dana Desa sudah efektif karena telah mencapai 100% setiap tahunnya. Rinciannya adalah pada tahun 2023 sebesar 100%, tahun 2025 sebesar 100% dan 2024 sebesar 100%.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan selama tahun 2023 – 2025 berkategori Rendah dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rinciannya adalah pada tahun 2023 sebesar 12,58% kemudian tahun 2024 menurun menjadi 9,40% dan pada tahun 2025 meningkat signifikan menjadi 20,49%. Sedangkan Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa selama tahun 2023 – 2025 juga berkategori rendah dan mengalami fluktuasi. Rinciannya adalah pada tahun 2023 sebesar 9,81%, tahun 2024 meningkat menjadi

14,14%, dan pada tahun 2025 menurun³ menjadi -26,04%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sencalang dalam meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan maupun Belanja belum optimal karena realisasinya tidak terserap secara maksimal dalam kegiatan pembangunan desa.

5.2 Saran

- ³1. Pemerintah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir disarankan untuk mempertahankan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sudah mencapai 100% setiap tahunnya, karena hal ini menunjukkan kemampuan yang baik dalam merealisasikan target penerimaan ADD.
2. Pemerintah Desa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir disarankan untuk meningkatkan penyearapan anggaran belanja agar dana yang sudah dianggarkan dapat terealisasi secara maksimal dan tidak menghasilkan sisa anggaran yang semakin besar setiap tahunnya.
3. Pemerintah Desa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir disarankan untuk melakukan evaluasi berkala setiap semester terhadap realisasi anggaran belanja, agar apabila ada kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana dapat segera dilakukan penyesuaian sehingga penyerpan dana lebih optimal.
4. Pemerintah Desa Kecamatan Keritang disarankan untuk mendorong dan memfasilitasi pengurus BUMDes dalam meningkatkan efisiensi unit usaha, dengan memfokuskan pengembangan pada unit Perkebunan Sawit

dan Ketahanan Pangan Jagung yang terbukti produktif, serta mengevaluasi Unit Simpan Pinjam yang mengalami penurunan. Selain itu, pemerintah desa perlu mendukung upaya pengurangan ketergantungan pada sektor pertanian melalui pengembangan unit non-pertanian seperti Pengelolaan Pasar dan Penyewaan Kursi agar Sisa Hasil Usaha (SHU) tidak terlalu bergantung pada harga komoditas.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan rasio keuangan seperti rasio keserasian dan rasio efisiensi serta memperpanjang periode penelitian agar hasil penelitian lebih komprehensif dalam menggambarkan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara menyeluruh.

PARAFASE 5.docx

ORIGINALITY REPORT

47%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.uir.ac.id Internet	1091 words — 9%
2	repository.unisi.ac.id Internet	1039 words — 9%
3	ejournal.unisi.ac.id Internet	577 words — 5%
4	repository.iainpare.ac.id Internet	572 words — 5%
5	repository.unwira.ac.id Internet	517 words — 4%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet	359 words — 3%
7	tematik.unisi.ac.id Internet	267 words — 2%
8	eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id Internet	240 words — 2%
9	repository.unibos.ac.id Internet	229 words — 2%
10	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	205 words — 2%
11	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	147 words — 1%
12	repository.radenintan.ac.id Internet	78 words — 1%

13 Elsa Yulida, Zuraidah Zuraidah, Zulkifli Umar. "Analisis Laporan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan di Desa Trieng Meuduroe Kabupaten Aceh Selatan", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 69 words — 1%

Crossref

14 eprints.umpo.ac.id 65 words — 1%

Internet

15 eprints.umsb.ac.id 65 words — 1%

Internet

EXCLUDE QUOTES ON
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES < 1%
EXCLUDE MATCHES < 1 WORDS